



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MENCEGAH BULLYING PADA SISWA ADHD DI SD INKLUSIF

Rizka Khairunnisa¹⁾, Muhammad Fauzan Muttaqin²⁾

¹⁾PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Daarul Qur'an Jakarta, Tangerang, Indonesia
Email: zkakhairunnisa@gmail.com

²⁾PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Daarul Qur'an Jakarta, Tangerang, Indonesia
Email: fauzan@idaqu.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of Child-Friendly Schools (SRA) policies in preventing bullying of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in inclusive elementary schools. The main focus of the research is how SRA principles are applied to create a safe, inclusive, and supportive learning environment for students with special needs. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the role of teachers, school policies, and intervention strategies designed to build an anti-bullying culture. Data was obtained through literature studies and field observations, then analyzed using content analysis techniques. The results of the study show that comprehensive assessment, curriculum modification, and support of special assistant teachers are key factors in the success of inclusive education. The consistent and collaborative implementation of SRA policies has been proven to increase the awareness of all school residents on the importance of protecting and accepting student diversity. In addition, the involvement of teachers, parents, and sustainable government policies is indispensable to strengthen inclusive education systems. This study emphasizes that the implementation of SRA is not only a bullying prevention strategy, but also a strategic step in ensuring the right of children with special needs to obtain equal, quality, and development-oriented education that is oriented towards the development of potential and positive character.

Keywords: Inclusive Education, Anti-Bullying, Children with Special Needs.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam mencegah perundungan terhadap siswa dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) di sekolah dasar inklusif. Fokus utama penelitian adalah bagaimana prinsip-prinsip SRA diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan suportif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah peran guru, kebijakan sekolah, serta strategi intervensi yang dirancang untuk membangun budaya anti-bullying. Data diperoleh melalui studi pustaka dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen komprehensif, modifikasi kurikulum, serta dukungan guru pendamping khusus menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Implementasi kebijakan SRA yang konsisten dan kolaboratif terbukti meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya perlindungan dan penerimaan keberagaman siswa. Selain itu, keterlibatan guru, orang tua, dan kebijakan pemerintah berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SRA bukan hanya strategi pencegahan bullying, tetapi juga langkah strategis dalam menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang setara, berkualitas, dan berorientasi pada pengembangan potensi serta karakter positif.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Anti Perundungan, Anak Berkebutuhan Khusus.



PEDOMAN UMUM

Pendidikan inklusif menekankan pentingnya memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, termasuk anak dengan kebutuhan khusus seperti ADHD. Siswa dengan ADHD sering menghadapi masalah sosial yang kompleks di sekolah dasar inklusif, salah satunya adalah risiko perundungan (*bullying*) oleh teman sebaya. Perundungan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis anak, tetapi juga menghambat proses belajar dan perkembangan sosial mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga pendidikan telah mendorong kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai strategi sistemik untuk membuat lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan anak. Kebijakan ini menekankan perlindungan hak anak, meningkatkan nilai-nilai toleransi, dan mencegah segala bentuk kekerasan di sekolah. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan SRA untuk siswa dengan ADHD masih menghadapi sejumlah masalah. Yang paling penting adalah pemahaman guru, partisipasi seluruh sekolah, dan pembuatan strategi pembelajaran yang sesuai.

Bullying atau perundungan di lingkungan sekolah merupakan fenomena global yang berdampak serius terhadap perkembangan psikososial dan akademik peserta didik. Studi menunjukkan bahwa perundungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, penurunan motivasi, gangguan belajar, dan bahkan terkadang menyebabkan tindakan fatal seperti bunuh diri. Selain itu, anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) lebih mungkin menjadi korban perundungan karena keterbatasan mereka dalam komunikasi, interaksi sosial, dan kemampuan akademik. Situasi ini menunjukkan bahwa membuat sekolah yang aman, ramah, dan inklusif masih sulit, terutama di sekolah yang menggunakan sistem inklusi. (Irwanti and Haq 2023).

Pendidikan inklusif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan sekolah reguler. Namun, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah belum meratanya pemahaman semua elemen sekolah terhadap konsep keberagaman dan pentingnya penerimaan sosial. Hal ini kerap kali menciptakan kesenjangan relasi antarsiswa, di mana siswa ABK merasa terpinggirkan, diabaikan, atau bahkan menjadi sasaran olok-olok dan kekerasan nonfisik (Siron et al. 2021).

Pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi harus didukung oleh budaya sekolah yang menyambut keberagaman, menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*), dan mempromosikan relasi sosial yang sehat. Budaya ini tidak tumbuh begitu saja, melainkan harus dibangun secara sadar dan sistematis melalui program

pendidikan yang inklusif, termasuk pendidikan anti-*bullying* (Rahayu and Marheni 2020).

Pelaksanaan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Praktik diskriminatif masih sering terjadi, di mana sebagian besar ABK tidak disatukan dengan siswa reguler, melainkan diarahkan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, SLB belum tentu mampu memberikan pengembangan potensi secara menyeluruh bagi ABK, dan justru dapat membatasi kesempatan mereka untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan anak-anak lain. Situasi ini berisiko membuat ABK terpinggirkan dari kehidupan sosial, sementara pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan kebutuhan mereka pun masih rendah (Gustaman et al., 2025). Proses pembelajaran adalah proses transfer pengetahuan antara pendidik dan siswanya. Oleh karena itu, pendidik harus menggunakan model pembelajaran yang tepat saat menerapkan materi agar penyampaianya efektif, terarah, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. (M. Misbah, 2023) Pendidikan inklusif adalah alternatif yang menawarkan pendekatan pendidikan yang setara dan terbuka bagi semua orang, selaras dengan prinsip pendidikan untuk semua. Kualitas sistem pendidikan yang diterapkan sangat penting untuk kemajuan sebuah negara, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menunjukkan hal ini.

Topik inklusif dalam dunia pendidikan telah banyak dibahas, baik dalam tataran teoritis maupun praktiknya. Namun, implementasinya di lapangan kerap menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, terbatasnya pelatihan profesional untuk guru, serta minimnya fasilitas penunjang dan dukungan kebijakan dari pihak sekolah. Banyak pendidik masih menerapkan metode konvensional yang tidak mampu menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan belajar siswa. Padahal, guru memiliki tanggung jawab penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik (Tri & Saptadi, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang inovatif dan pemanfaatan teknologi secara kreatif dalam proses pembelajaran, guna menjamin bahwa setiap siswa merasa dihargai, mendapatkan dukungan yang tepat, dan mampu mengembangkan potensi serta meraih prestasi secara optimal.

Melalui konsep pendidikan inklusif, setiap anak terlepas dari kondisi fisik, mental, atau sosialnya diberikan peluang untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa dilakukan baik disekolah inklusi maupun disekolah umum yang dilengkapi dengan sarana dan dukungan yang memadai. Model pendekatan ini bukan hanya memperkuat pelaksanaan pendidikan ramah anak, tetapi juga berfungsi sebagai upaya konkret dalam menjamin hak semua anak terhadap pendidikan yang layak.



Dengan semakin luasnya penerapan model pendidikan inklusif, diharapkan program wajib belajar akan lebih berhasil dicapai. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah strategis menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif, yang mencerminkan masyarakat yang menghargai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warganya.

Selain tantangan yang telah dipaparkan, kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga menuntut adanya perubahan pola pikir di kalangan pendidik dan masyarakat. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter yang menekankan nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, penerapan SRA menjadi langkah strategis untuk membangun budaya sekolah yang inklusif, di mana setiap anak, termasuk siswa dengan ADHD, merasa aman dan diterima.

Lebih jauh, penerapan SRA dalam konteks pendidikan inklusif juga menjadi indikator keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam menjamin hak anak. Hal ini sejalan dengan prinsip *education for all* yang menekankan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan. Dengan adanya kebijakan yang berpihak pada anak, sekolah diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang menekan praktik diskriminasi dan perundungan, serta memperkuat peran pendidikan sebagai sarana membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia, penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga harus dipahami sebagai upaya strategis untuk membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini menjadi semakin penting mengingat anak dengan ADHD sering menghadapi stigma dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah reguler. Dengan adanya kebijakan SRA, sekolah diharapkan mampu menciptakan iklim yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, baik dari aspek akademik, sosial, maupun emosional. Penerapan kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap *education for all*, yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, SRA bukan hanya sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah paradigma baru yang menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya generasi yang berkarakter, berempati, dan siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak

(SRA) dalam mencegah perundungan terhadap siswa dengan ADHD di sekolah dasar inklusif. Populasi penelitian mencakup seluruh elemen sekolah inklusif, dengan sampel yang dipilih secara purposive, yaitu guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), serta siswa dengan ADHD sebagai fokus utama. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan meninjau jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan, serta observasi lapangan yang menyoroti praktik pembelajaran dan interaksi sosial siswa. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan catatan lapangan yang disusun berdasarkan indikator kebijakan SRA.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Proses asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penerapan kebijakan SRA, efektivitas strategi intervensi, serta peran guru dan GPK dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan sekolah yang relevan sebagai sumber data tambahan, dengan dukungan perangkat sederhana seperti laptop dan aplikasi pengolah kata untuk membantu pengorganisasian hasil penelitian. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik nyata kebijakan SRA di sekolah dasar inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami keterbatasan baik dari segi intelektual, sosial, emosi dan fisik dari apa yang dianggap normal. Menurut Kosasih, anak berkebutuhan khusus (*special needs children*) adalah anak yang mengalami gangguan (*retarded*) atau anak yang lambat (*slow*) yang tidak pernah berhasil disekolah seperti anak pada umumnya. Menurut WHO (*World Health Organization*) definisi untuk menyebut anak berkebutuhan khusus memiliki banyak istilah yang digunakan (Wijaya, 2019), seperti:

- Disability*, anak yang memiliki keterbatasan dalam menampilkan aktivitas sesuai aturan pada umumnya.
- Impaimnt*, yaitu kondisi psikologis, struktur anatomi dan fungsinya yang tidak normal seperti manusia pada umumnya.
- Handicap*, yaitu kondisi keterbatasan yang dapat menghambat pemenuhan peran yang normal seperti manusia pada umumnya.

Sebelum menentukan kriteria anak tersebut masuk kriteria Anak Berkebutuhan Khusus perlu diadakan Asesment awal yang dilakukan oleh guru atau psikolog. Guru wajib melakukan asesmen komprehensif terhadap setiap anak berkebutuhan khusus sejak awal mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif. Asesmen ini bertujuan untuk menghimpun informasi selengkap-lengkapny



mengenai kondisi individu, baik kekuatan maupun kelemahannya, guna menentukan strategi pembelajaran dan layanan yang sesuai. Menurut Deby Indriani Rahmawan, asesmen tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti psikolog dan guru pendamping khusus (GPK) agar hasilnya objektif. Asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui beberapa tahap, yaitu *Baseline Assessment* (mengetahui kemampuan awal anak), *Progress Assessment* (memantau perkembangan selama proses belajar), *Specific Assessment* (menggali kebutuhan tertentu anak), *Final Assessment* (menilai ketercapaian tujuan belajar), dan *Follow-Up Assessment* (menentukan tindak lanjut pembelajaran). Hasil asesmen digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program belajar individual (*Individualized Education Program/IEP*) serta modifikasi kurikulum agar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing anak. (Rahmawan, 2020) Proses asesmen yang komprehensif dan akurat terhadap setiap anak berkebutuhan khusus bertujuan mengetahui kesulitan dan kelebihanannya, sehingga guru dapat memberikan penanganan dan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing anak.

Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah individu yang memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari anak-anak pada umumnya, meskipun tidak selalu berkaitan dengan hambatan secara mental, emosional, atau fisik. Sementara itu, berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013, anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan atau keistimewaan dalam aspek fisik, intelektual, sosial, maupun emosional yang berdampak nyata terhadap proses tumbuh kembangnya jika dibandingkan dengan anak seusianya (Saputri et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, istilah "penyimpangan" secara jelas merujuk pada anak-anak yang menunjukkan perbedaan signifikan dari kondisi anak-anak pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun perilaku sosial. Anak-anak ini memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan rata-rata, karena mengalami kendala dalam hal kemampuan berpikir, pendengaran, penglihatan, interaksi sosial, maupun gerak motorik. Berdasarkan pengertian tersebut, anak berkebutuhan khusus mencakup berbagai kondisi, seperti *Disleksia learning* (kesulitan dalam belajar membaca), *ADHD* (gangguan konsentrasi), *Autisme* (gangguan perkembangan saraf), *Speech Delay* (lambat dalam kemampuan berbicara), *Down Syndrome* (keterlambatan perkembangan fisik dan mental), *Tuna Grahita* (tingkat kecerdasan di bawah rata-rata), serta *Tuna Rungu* (gangguan pada pendengaran) (Saputri et al., 2023).

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang sangat berbeda dari anak-anak biasa dalam hal fisik, mental, maupun perilaku sosial. Perbedaan ini dapat disebabkan

oleh gangguan dalam berpikir, berkomunikasi, bergerak, maupun berinteraksi sosial. Kategori anak berkebutuhan khusus mencakup berbagai kondisi seperti *disleksia*, *ADHD*, *autisme*, *speech delay*, *down syndrome*, *tuna grahita*, dan *tuna rungu*, yang semuanya memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual mereka.

Dengan demikian, berbagai kondisi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tidak mengurangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, berbagai kebutuhan tersebut menunjukkan betapa pentingnya menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan ramah setiap anak. Pendidikan adalah cara utama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mencapai potensi mereka, menjadi lebih mandiri, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang manusiawi dan holistik. Dengan membangun sekolah ramah anak (SRA), kurikulum inklusif dan upaya tenaga pendidik dapat mencapai hal ini.

Salah satu tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk mengurangi hambatan dalam proses tumbuh kembang anak dan memperluas peluang mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari secara wajar. Selain itu, pendidikan inklusif juga berperan dalam mencegah kondisi perkembangan anak yang semakin memburuk serta menghindari munculnya keterbatasan lain yang dapat timbul akibat ketidakmampuan utama yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pendekatan individual perlu diterapkan guna mengatasi berbagai tantangan, seperti rendahnya semangat belajar dan keterbatasan ekonomi peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kerja sama erat antara guru dan orang tua (Saputra, 2018).

Tujuan dari peneliti pendidikan inklusif adalah untuk menjamin hak semua anak, termasuk ABK, untuk akses pendidikan yang setara. Meskipun dilindungi oleh konstitusi, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, seperti diskriminasi dan keterbatasan layanan. Hampir tidak ada ABK yang menerima pendidikan formal. Pengembangan sosial dan akademik siswa masih kurang di sekolah luar biasa. Solusi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, ramah, dan merata untuk semua anak adalah pendidikan inklusif.

Melihat kondisi yang ada, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih memerlukan perhatian dan layanan yang lebih optimal. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional, yang mencakup empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini seharusnya tidak hanya dibebankan kepada orang tua, melainkan juga melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah (Hanifah et al., 2022). Keterlibatan semua pihak tersebut sangat



penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Kompetensi guru dan Guru Pendamping Khusus (GPK) sangat penting untuk keberhasilan pendidikan inklusif. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan pengetahuan yang memadai tentang cara mengatur pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan khusus siswa. Sementara itu, GPK membantu siswa berkebutuhan khusus, guru kelas, dan teman sebaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, adaptif, dan inklusif. GPK harus dapat membuat dan menerapkan Program Pembelajaran Individual (PPI), melakukan evaluasi terus-menerus, dan menyesuaikan strategi dan media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. (Sari Rudiati, 2005) Selain keterampilan teknis, GPK juga perlu memiliki empati, kemampuan komunikasi efektif, serta menjadi teladan dalam perilaku sosial yang positif. Kompetensi tersebut tidak hanya membantu siswa berkebutuhan khusus mencapai potensi maksimalnya, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi keberagaman kebutuhan siswa di kelas. Dengan demikian, sinergi antara guru dan GPK menjadi faktor kunci dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, suportif, dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan pendidikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah inklusif memberikan dampak positif terhadap siswa dengan ADHD. Asesmen komprehensif yang dilakukan sejak awal terbukti membantu guru dalam memahami kebutuhan individual siswa, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi mereka. Modifikasi kurikulum dan dukungan guru pendamping khusus juga berperan besar dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa ADHD serta mengurangi potensi perundungan. Selain itu, keterlibatan siswa reguler melalui program dukungan sebaya (peer support) memperlihatkan hasil signifikan dalam membangun solidaritas dan penerimaan sosial, sehingga iklim sekolah menjadi lebih aman dan inklusif.

Temuan tersebut memperkuat pembahasan bahwa keberhasilan kebijakan SRA tidak hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada komitmen seluruh warga sekolah untuk menjalankannya secara konsisten. Guru berperan sebagai agen utama dalam menanamkan nilai anti-bullying melalui pembelajaran adaptif dan teladan perilaku positif, sementara orang tua dan masyarakat perlu mendukung nilai inklusif di luar sekolah. Evaluasi berkelanjutan terhadap aspek akademik, sosial, dan emosional siswa menjadi penting agar kebijakan SRA tetap relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan sinergi antara guru, siswa, orang tua, dan kebijakan pemerintah, sekolah inklusif dapat benar-benar menjadi ruang yang ramah anak, melindungi hak siswa ADHD, serta

memastikan mereka berkembang secara optimal dalam aspek akademik maupun sosial-emosional.

Selain itu, hasil observasi memperlihatkan bahwa sekolah yang konsisten menjalankan kebijakan SRA mampu membangun iklim psikologis yang positif. Siswa ADHD menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan rasa percaya diri karena merasa dilindungi oleh sistem sekolah. Guru pendamping khusus juga melaporkan adanya perkembangan signifikan dalam interaksi sosial siswa, yang ditandai dengan berkurangnya perilaku menarik diri dan meningkatnya partisipasi dalam kegiatan kelompok. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan SRA tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional siswa.

Pembahasan lebih lanjut menekankan bahwa penerapan kebijakan SRA dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam mengembangkan sistem pendidikan inklusif. Dengan memperkuat budaya sekolah yang menghargai keberagaman, sekolah mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya bebas dari bullying, tetapi juga mendukung pengembangan karakter positif siswa. Oleh karena itu, kebijakan SRA perlu terus dikembangkan melalui inovasi program, pelatihan guru, serta keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tambahan penting dari penelitian ini adalah perlunya dukungan kebijakan pemerintah yang lebih sistematis. Sekolah inklusif sering menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, dan sumber daya, sehingga intervensi dari pemerintah dalam bentuk pelatihan guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta monitoring kebijakan menjadi krusial. Tanpa dukungan struktural, kebijakan SRA berisiko hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan harus dijamin melalui regulasi yang jelas dan pendanaan yang memadai.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Lingkungan sosial yang menerima keberagaman akan memperkuat peran sekolah dalam menciptakan budaya inklusif. Program sosialisasi dan kampanye anti-bullying yang melibatkan orang tua, komunitas, dan lembaga terkait dapat memperluas dampak kebijakan SRA di luar sekolah. Dengan demikian, pencegahan bullying terhadap siswa ADHD tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah dasar inklusif berperan penting dalam mencegah perundungan terhadap siswa dengan ADHD. Asesmen komprehensif, modifikasi kurikulum, serta dukungan guru pendamping



husus terbukti menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan suportif. Penerapan kebijakan SRA secara konsisten mampu meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap pentingnya perlindungan anak, penerimaan keberagaman, serta pembentukan budaya anti-bullying yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan sekolah, tetapi juga pada keterlibatan aktif guru, orang tua, masyarakat, dan dukungan pemerintah. Sinergi antar pihak tersebut memperkuat sistem pendidikan inklusif yang berorientasi pada pengembangan potensi, karakter positif, dan kesejahteraan emosional siswa. Dengan demikian, penerapan SRA bukan hanya strategi pencegahan bullying, tetapi juga langkah strategis dalam menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kerjasama dalam proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi diberikan kepada rekan kerja, sahabat, dan mitra di sekolah inklusif yang senantiasa berkontribusi dalam pelaksanaan observasi dan pengumpulan data. Tidak lupa, penulis juga menghargai dukungan moral dan motivasi dari keluarga serta lingkungan akademik yang telah menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan karya ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri penulis sendiri atas komitmen, ketekunan, dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan selama penelitian berlangsung. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan inklusif dan menjadi langkah kecil dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak serta bebas dari praktik perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustaman, R. F., Gandi, A., Ratnaningsih, N., Siliwangi, U., Artikel, I., Inklusif, P., & Education, J. (2025). Implementasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. *Education and Development*, 13(1), 660–666.
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2022). Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37833>
- Irwanti, Renita Uki, and Aniq Hudiyah Bil Haq. 2023. "Efektivitas Psikoedukasi Dalam Peningkatan Pengetahuan Tentang *Bullying* Pada Remaja." *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*.
- M. Misbah, K. F. (2023). Studi Analitis Model Pembelajaran PAI Abad 21 berbasis Multiple Intelligences. *Studi analitis model pembelajaran pai abad 21 berbasis multiple intelligences*, 10(1), 310–324. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinataza-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>
- Rahayu, Saskia Putri, and Eddy Marheni. (2020). "Perilaku Masyarakat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Luar Biasa Perwari Padang." *Jurnal Performa Olahraga*.
- Rahmawan, D. I. (2020). Analisis Asesmen Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1(1), 47–62.
- Saputra, A. (2018). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- Saputri, M. A., Widiyanti, N., Lestari, S. A., & Hasanah, U. (2023). Ragam Anak Berkebutuhan Khusus. *Childhood Education. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 38–53.
- Sari Rudiayati. (2005). Peran dan Tugas Guru Pendamping Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 2005, 2203–2209.
- Siron, Yubaedi, Mardhiah Mardhiah, Isti Fajriah Nurrahma, and Anbar Salsabila. 2021. "PERAN GURU DALAM MENGHADAPI BULLY TERHADAP ANAK GAGAP DARI TEMAN SEBAYA." *Psycho Idea*.
- Tri, N., & Saptadi, S. (2025). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penciptaan Ruang Belajar Inklusif Berbasis Inovasi dan Kreativitas Teknologi di Era Digital. 5(1), 1–7.
- Wijaya, D. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Kencana.